

Awasi DPRD, Masyarakat Harus Kritis

Sabtu, 10-09-2014

Inung: Tak Ada Pilgub, Kami Tak Gantung Diri

politik," ajak Wakil Ketua Sementara DPRD DIJ Arif Noor Hartanto saat bicara dalam diskusi Pro & Kontra Pilkada Langsung vs DPRD yang dthelat DPD Katan Mahasiswa Mu-hammadiyah (MM) DIJ di gedung Pimpi-nan Wilayah Mu-hammadiyah (PWM) DIJ, kemarin (28/9).Inung, siapaan akrabnya berharap dengan beralihnya aturan pilkada dari dipilih langsung menjadi perwakilan di DPRD bukan berarti menghilangkan hak-hak politik ra-kyat. Apalagi menuduh sebagai perampo-kan terhadap kedaulatan rakyat.

kehilangan hak politik memilih gu-bernur, bukan berarti terus gantung diri. Hak politik lainnya terus tidak ada," ingat-nya dengan nada serius.Menyikapi perubahan sistem politik itu, Inung minta agar semua proses politik yang dijalankan DPRD diawasi. Itu demi meningkatkan kualitas demokrasi.

Namun berhubungan dengan se-mangat masyarakat kut menyukseskan calon yang didukungnya. Masyarakat rela mengeluarkan biaya untuk mem-bantu menjadi tm sukses. "Itulah yang kami namakan semangat gotong royong," tutur pria asal Jatsrono, Wonorejo, ini.Semangat gotong royong itulah yang memawai suksesnya pasangan Joko Wi-dodo- Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2012 lalu. Kemudian Tri Rismaharini sebagai wali kota Surabaya dan Ridwan Kamil yang terpilih menjadi wali kota Bandung.

(HS) sebagai ca-ton wali kota Jogja 2011.Sedangkan John Keban yang datang mewakili Partai Golkar sekaligus ang-gota tm perumus Koalisi Merah Putih (KMP) Provinsi DIJ mengatakan, demo-krasi merupakan cara melaksanakan sebuah cita-cita.

Demokrasi bukan menjadi tujuan. Partisipasi harus menjadi cara agar ter-wujudnya la pembangunan baik secara langsung versus DPRD bukan menjadi persoalan."Keduanya sama-sama demokrasi dan kondisional. Karena itu, harus bakal yang membangun modal bagi kese-jjahteraan rakyat.Diskusi terbuka itu juga menampilkan Bupati Sleman Sri Purnomo. Ia duduk bersanding dengan Ketua Lembaga Hik-mah dan Kebijakan Publik (LHKP) Mu-hammadiyah DIJ Arif Jamali Muis.Menyikapi pro kontra itu, Sri Purnomo memahami perubahan sistem politik itu sebagai bagian dari proses pembangunan dan pendidikan politik. Karena itu, bila ada yang tidak sepakat dengan keputusan DPR RI, maka ada salurannya yakni dengan mengajukan uj materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).Meski begitu, ia mengaku dapat mema-hani dan menerima perubahan sistem pilkada tersebut. Bupati yang menjabat sejak 2010 itu meyakini perubahan pil-kada langsung menjadi lewat DPRD akan membawa perbaikan bagi kehidupan ma-syarakat. "Harapan kita semua akan men-jadi lebih baik," katanya. (erikusfaz)

rener: <http://www.radarjogja.co.id/index/2014/09/28/awasi-dprd-masyarakat-harus-kritis/>